

PERTEMUAN FORUM BAKOHUMAS DAN PAMERAN KEHUMASAN POLRI



Penyerahan plakat Div Humas Polri kepada narasumber

Guna menyebarkan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan Polri, Humas mempunyai peranan yang sangat besar sebagai corong dalam mendukung tugas Polri di lapangan dalam membangun opini publik yang positif. Oleh karena itu dipandang perlu Forum pertemuan Bakohumas Pusat dapat melahirkan sinergi yang saling mendukung dan saling melengkapi untuk menyukseskan keamanan dalam negeri. Sebagaimana kesepakatan antara anggota Forum Bakohumas Pusat bahwa penyelenggaraan Forum Bakohumas diselenggarakan

bergantian dan bergiliran, untuk kali ini sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan forum silaturahmi antar anggota Bakohumas Pusat adalah Mabes Polri.

Pelaksanaan Pertemuan Forum Silaturahmi antar anggota Bakohumas Pusat dilaksanakan di Hotel Ambara, Jl. Iskandarsyah No. 1 Jakarta Selatan, selain Forum Silaturahmi anggota Bakohumas Pusat juga dilaksanakan Pameran Kehumasan Polri tahun 2007 kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antara anggota Bakohumas Pusat, sekaligus mensosialisasikan mengenai kasus

Trafficking dan *Illegal Logging* di Indonesia sesuai dengan visi dan misi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Peserta dari pertemuan Forum Bakohumas dan Pemeran Kehumasan Polri tahun 2007 berjumlah kurang lebih 80 orang yang berasal dari Instansi Pemerintah yang terdiri dari Humas Departemen, Lembaga Tinggi Non Departemen, BUMN dan TNI/Polri. Sedangkan Kepanitiaan didukung penuh dari Divhumas Polri, Bid. Humas Polda Metro Jaya, Humas BNN dan Dir Lantas Polda Metro Jaya. Pertemuan Bakohumas dibuka oleh Ketua Pelaksana Bakohumas Drs. Subagyo, MS.

dan Kadiv Humas Polri yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kabid Pensat Divhums Polri Kombes Pol. Drs. Runadi Ma'mun.

Dalam pelaksanaan Forum Pertemuan Bakohumas Pusat mengundang beberapa pembicara. Dari paparan pembicara mengatakan sebagai berikut :

"Belakangan ini banyak kejadian yang menimpa para tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri seperti pelecehan seksual, penjualan perempuan dan lain-lain dapat merugikan pihak perempuan". Polri dalam menangani kasus tersebut bekerjasama dengan pihak luar/Kepolisian Negara lain, agar dapat memudahkan pihak Polri dalam mengungkap dan menangani masalah yang ada demikian antara lain Karo Analisis Bareskrim Polri Brigjen Pol. Drs. Matus Salempang dalam paparannya yang berkaitan dengan Penegakan Supremasi Hukum dalam rangka pemberantasan *Traficking*.



Penutupan Pertemuan Bakohumas

Sementara itu Wadir V Bareskrim Polri Kombes Pol. Drs. Sadar Sebayang berpendapat *"terjadinya pembalakan liar disebabkan karena faktor lemahnya pengawasan hutan oleh petugas yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pelestarian hutan baik dari segi kualitas, kuantitas, fasilitas dukungan anggaran serta faktor kesejahteraan"*. Selain itu masih banyak peraturan dan ketentuan dibawah Undang-undang No. 41 Tahun 1999, seperti PP, Keppres, Inpres, Kepmen

dan lain-lain yang tersebar dibawah Departemen belum diakomodir sebagai pelengkap UU diatasnya. Polri telah banyak melakukan tindakan, namun komitmen dari seluruh lapisan masyarakat serta komitmen bersama antar Departemen perlu diperkuat lagi secara yuridis, sehingga perlindungan dan pelestarian hutan tetap dapat diwujudkan.

Diskusi masalah *Traficking* dan *Illegal Logging* berjalan lancar dan menarik terutama penegakan hukum yang dilakukan Polri, banyak peserta yang menyarankan kepada Polri agar mengambil tindakan yang lebih tegas kepada pihak-pihak yang terlibat kasus *Traficking* dan *Illegal Logging*. Dalam penanganan *Illegal Logging* pihak Polri harus menindak aktor intelektual/cukong, jangan sampai kasus Adelin Lis terulang kembali. Selain itu perlu penanganan yang lebih mendalam tentang kasus maraknya penjualan *perempuan muda* dengan modus TKW yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.***

PENCURIAN IKAN RUGIKAN NEGARA Rp. 30 TRILIUN PER TAHUN



Barang bukti ikan yang disita

Total kerugian negara akibat pencurian ikan diperkirakan mencapai Rp. 30 Triliun per tahun. Penangkapan ikan secara ilegal juga ditengarai sebagai penyebab buruknya industri pengolahan ikan di Indonesia. Pada hal potensi sumber daya ikan nasional mencapai 6,4 juta ton per tahun. Sebanyak 25% dari angka itu diperkirakan ditangkap secara ilegal *"Jika dikalikan dengan harga internasional US\$ 2 per kilogram, kerugian mencapai Rp. 30 Triliun per tahun"*, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi saat memaparkan hasil analisis dan evaluasi hasil *illegal fishing* di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Freddy Mengakui stafnya ada yang menyalahgunakan wewenang. *"Kami tahu persis bahwa memang ada anak buah saya dilapangan yang nakal-nakal itu,"* kata Freddy Numberi. Ia mencontohkan ijin seorang Kepala Dinas kapal ikan berkapasitas diatas 100 gross ton. Padahal Pemerintah Daerah hanya bisa mengijinkan kapal berkapasitas 30 gross ton. Modusnya, duplikasi ijin dan kapasitas tangkapan ikan. Sepanjang akhir tahun lalu Polisi menangkap 16 kapal pelaku *illegal fishing*. Dua kapal diantaranya berbendera Thailand,

dua berbendera Indonesia. Dari penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti 5.000 ton ikan. Dengan asumsi harga per kilogram Rp.3.000,- diperkirakan kerugian negara akibat pencurian ikan di Perairan Arafuru sebesar Rp.13 triliun. *"Seharusnya lebih besar dari itu, karena diantara barang bukti itu ada pula ikan mahal mencapai Rp. 800 ribu per kilogram,"* ujar Kapolri disela-sela acara pemaparan hasil analisis dan evaluasi illegal fishing.

Dari pengungkapan di Perairan Arafuru tersebut Polisi menahan 400 anak buah kapal warga asing, antara lain Thailand dan Burma, namun Polisi hanya akan memproses 21 orang, sedangkan sisanya dipulangkan kenegara asalnya.(nats)***



Para tersangka pencurian ikan di perairan Arafuru

MENGUNGKAP ILLEGAL FISHING DI MALUKU TENGGARA

"Berbagai tindak kejahatan yang menjarah sumberdaya alam, kerap kali terjadi di bumi Indonesia ini, mulai dari bidang perikanan (illegal logging), pertambangan (illegal mining), trafficking (perdagangan manusia), sampai kepada perikanan (illegal fishing). Bagaimana tidak, bumi Nusantara kita memang terkenal dengan melimpahnya sumber daya alam (darat maupun laut). Faktor inilah yang membuat cukong-cukong asing yang bekerjasama dengan oknum lokal, menggaruk hasil kekayaan alam kita. Tidak tanggung-tanggung, kerugian Negara yang dikibatkan kejahatan bidang perikanan/illegal fishing di Maluku Tenggara ini pertahun mencapai +/- Rp.31,1 triliun! sebuah angka yang fantastis, dan kegiatan tersebut sudah berlangsung lebih dari tiga tahun belakangan ini."

Hal itulah yang membuat Pemerintah /Penegak Hukum dari pusat merasa segera perlu menangani kegiatan yang melanggar hukum sekaligus telah merugikan Negara. Maka digelarlah operasi besar-besaran pemberantasan *illegal fishing* oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Maluku pada akhir November sampai awal Desember 2007 perairan Maluku Tenggara /kepulauan laut Arafuru. Tim gabungan tersebut terdiri atas unsur Bareskrim Polri, Pol. Udara, Dokkes dan Div Humas, yang dipimpin langsung oleh Brigjen. Pol.

Hadiatmoko Direktur V / Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri.

Dari beberapa kali gelar operasi, maka pada tanggal 26 Nopember 2007 di perairan Tual, telah ditangkap 7 buah kapal jenis Trampler dan Trawl dengan ABK sebanyak 160 orang (160 orang WN Thailand, 8 Orang WNI dan 1 otarang WN Myanmar), dengan hasil tangkapan ikan beku sebanyak +/- 1.932. ton. Pada tanggal 7 Desember 2007, di perairan Benjina, juga ditangkap 7 (tujuh) buah kapal Trampler dan Trawl dengan ABK sebanyak 146 orang terdiri dari 146 orang WN Thailand, 10 Orang WNI, dan 1 orang WN Myanmar, dan dengan hasil tangkapan ikan yang dibekukan sebanyak +/- 1.500. ton. Sedangkan di Ambon Maluku, telah ditangkap KM Ciliman 10 (atas nama Mr.PW -WN Thailand) lengkap dengan 2 buah kapal Trawl dan muatan ikan beku yang sudah dipindahkan ke kapal pengangkut. Sedangkan di laut Seram telah ditangkap KM.Binar 330 (a.n. Mr.NB WN. China) lengkap dengan alat pengakap ikan Trawl, dan ikan beku sebanyak 85 ton.

Dalam proses penyidikan menyeluruh tentu saja sudah dilaksanakan dengan seksama, sesuai dengan kaidah hukum kita, yaitu; Pemeriksaan Tersangka (yang menetapkan 16 tersangka) terbatas pada Nakoda dan Kepala Kamar Mesin Kapal, Pemeriksaan Saksi (seluruh awak kapal yang tertangkap), Pemeriksaan Ahli,

Melengkapi Administrasi Penyidikan, Pemberkasan Perkara dan Mengajukan berkas ke Pengadilan, dan tentu saja proses lelang barang bukti ikan.

Dan dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran sebagai berikut;

1. Undang-Undang Perikanan

No.31 Tahun 2004 yaitu :

- Ijin tangkap tidak sesuai dengan ketentuan Departemen Kelautan Perikanan, karena 1 SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) digunakan untuk beberapa kapal.
 - Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dan dengan menggunakan pukat harimau/Trawl.
 - Penangkapan ikan dilakukan diluar fishing ground/daerah tangkapan dalam SIPI.
 - Kejahatan Korporasi.
2. Undang-undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
 3. Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP.
 4. Undang undang no.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang undang No.25 Tahun 2005 tentang tindak pidana pencucian uang/*money loundring* yang dapat dikenakan kepada Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Keuangan para perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah melatar belakangi kegiatan *illegal fishing* tersebut.
 5. Undang undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas (BBM Bersubsidi) di Tual dan Benjina yg dapat dikenakan kepada Kadept Pertamina, Ka DKP/PPN, Syahbandar, Agen Perusahaan & Badan Usaha BBM. Atau dapat juga dikenakan Undang undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dampak negatif luar biasa dari 'Illegal fishing'

Tidak dipungkiri lagi bahwa akibat nyata dari kegiatan *Illegal fishing* tersebut ternyata sangat luas dan langsung menyengsarakan masyarakat daerah setempat.

Mulai dari kerugian negara yaitu; dari hasil tangkapan ikan per/bulan : 1457 kali kapal penangkapan X 250.000. kg X Rp.3.000 (harga limit) = Rp.1.092.750.000.000,- (satu trilyun sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan untuk hasil tangkapan satu tahun dikalikan 12 = **Rp.13.113.000.000.000,-** (tiga belas trilyun seratus tiga belas milyar rupiah). Belum lagi kerugian Negara dari *penyalah gunaan BBM bersubsidi* yang telah berlangsung selama 20 bulan, yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp.532.500.000.000,- (lima ratus tiga puluh



Beberapa kapal sitaan sebagai barang bukti

dua milyar lima ratus juta rupiah.).(dengan perincian : 355 kapal berlayar X 25 KL (2500 L) X Rp.3000,- (Rp.7.300.- Rp.4.300)/perbulan = Rp.26.625.000.000, X 20 bulan = **Rp.532.500.000.000,-**

Dampak yang paling serius lagi adalah sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan di Tual dan Benjina tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu **PHK** (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. (Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya *trans-shipment* dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat).

Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan yang permanen, karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat penggunaan alat penangkap ikan skala besar (Pukat Harimau dan Trawl) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan Arafuru, karena hampir 3 tiga tahun terjadi kegiatan penangkapan ikan secara semena-mena dan bersifat eksploitatif.

Hasil operasi tersebut sangat disambut baik oleh para pengusaha ikan lokal, karena tindakan tegas Polri akan memberikan harapan kepada mereka untuk kembali bergiat dalam usaha pengolahan ikan yang selama ini terpuruk. Selama ini sepak terjang "oknum aparat" yang ikut mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Dan keadaan lainnya juga dimanfaatkan oleh "oknum", karena masih banyak "celah" dalam peraturan perikanan yang ada, misalnya kapal-kapal asing yang beroperasi seharusnya mendapat izin dari Departemen kelautan dan Perikanan & Direktorat Perhubungan Laut. Tapi faktanya di lapangan kapal-kapal yang tidak punya izin dapat beroperasi, ini menandakan masih adanya "permainan oknum didaerah" tersebut. Kita berharap., dengan operasi kali ini, dapat membuat jera seluruh pelaku beserta matarantai "oknum/aparat" yang terlibat, dan pada gilirannya akan mampu membangkitkan kembali industri pengolahan ikan lokal sebagai denyut nadi perekonomian masyarakat/sekaligus sebagai sumber penghidupannya. *(Moch.Rizal Pahlevi.N)*

ASEAN WORKSHOP ANTI TERROR DISELENGGARAKAN DI JAKARTA



Sambutan dalam acara pembukaan

Sebagai langkah untuk menindaklanjuti kesepakatan pertemuan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (ASEAN-SOMTC) ke-VI, Bali Juni 2006 dan upaya implementasi ASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism, Indonesia selaku coordinator (lead shepherd) kerjasama ASEAN dibidang Counter-Terrorism, dengan dukungan pemerintah Canada, menyelenggarakan ASEAN Workshop on Forging Cooperation Among the Anti Terror Units di Jakarta, tanggal 23-24 Januari 2008.

Lokakarya dibuka secara resmi oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Bambang Hendarso Danuri dan diketuai oleh Direktur Polkam ASEAN Departemen Luar Negeri I Gusti Ngurah Swajaya. Delegasi Indonesia pada Lokakarya ini terdiri dari perwakilan dari instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dalam penanganan terorisme antara lain Polri, Departemen Luar Negeri, Kementerian Polhukam, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Bea dan Cukai dan BIN. Bertindak sebagai

pembicara dalam Lokakarya ini adalah para pakar yang berasal dari Royal Canadian Mounted Police (RCMP) Interpol Secretariat General (IPSG), Multi National Operational Support Team (MNOST), Bidang Transnational Crime Center (TNCC) Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Lokakarya ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan suatu wadah bagi para pejabat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme dari seluruh Negara-negara ASEAN untuk saling bertukar informasi terkini, data intelijen serta bertukar pengalaman dalam menangani jaringan teroris dengan modus operandi, serta strategi rekrutmen dan pelatihannya

Para peserta juga saling bertukar pikiran dalam hal upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam penanggulangan terorisme melalui pelatihan-pelatihan serta metode-metode lainnya. Diskusi para peserta membahas akan pentingnya perluasan bantuan hukum timbal balik dalam penanganan terorisme guna efektifitas implementasi koordinasi dan kerja-sama.***

MEMBANGUN SDM BRIMOB POLRI, MELALUI LATIHAN LIMA KEMAMPUAN BRIMOB POLRI



Penanganan rusuh masal dengan menggunakan water cannon

Dalam rangka membangun SDM untuk menghadapi situasi kontijensi, maka jajaran Korp Brimob Polri mengadakan pelatihan lima kemampuan Brimob Polri. Selama ini pola pembinaan latihan di Brimob Polri meliputi latihan rutin, latihan pra ops dan prolat. Latihan rutin yang dilakukan yaitu perorangan dasar, perorangan lanjutan. Perorangan dasar dan perorangan lanjutan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jum'at. Untuk latihan rutin satuan dasar dan satuan lanjutan dilaksanakan sepanjang tahun yang dibagi 4 triwulan, meliputi latihan Resmob, Wanteror, Jibom, SAR dan PHH. Pada saat mengadakan latihan terpadu lima kemampuan Brimob Polri dilapangan Latihan Multi Fungsi Polri Cikeas Bogor, skenarionya ialah "Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya mengedepankan kemitraan dengan masyarakat yang lebih dikenal dengan Perpolisian Masyarakat (Community Policing)".

Brimob Polri yang merupakan bagian dari Polri yang membantu kewilayahan terutama di daerah konflik yang melaksanakan tugasnya membuat pos-pos Perpolisian Masyarakat (Pos Polmas) guna menjalin kemitraan dengan masyarakat. Melalui Pos Polmas dilaporkan masyarakat ada sekelompok orang disalah satu tempat (diindikasikan kelompok orang tersebut telah melakukan serangan teror) dan berlingkup diperkampungan masyarakat, mereka membuat brikade-brikade yang sangat mengganggu masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, sehingga membuat suasana mencekam. Setelah petugas dari Kepolisian wilayah beberapa kali mengadakan negosiasi kepada kelompok tersebut, agar

menyerahkan diri akhirnya Kasatwil melaporkan kepada Kapolda, sehingga Kapolda membuat suatu maklumat namun kelompok tersebut tetap tidak mau menyerahkan diri.

Maka Mabes Polri dengan perkuatannya menurunkan fungsi kepolisian guna menegakkan hukum dengan menggelar Operasi Kepolisian. Atas perintah Kapolri, Brimob dengan perkuatannya melakukan Operasi Kepolisian dengan mengedepankan lima kemampuan Brimob yaitu ; **Resmob, Wanteror, SAR, Jibom dan PHH**. Resmob melaksanakan pengepungan dan penangkapan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku teror, SAR melaksanakan bantuan pasukan dan Evakuasi korban, Jibom melaksanakan sterilisasi dan disposal bom kemudian anggota PHH melaksanakan lintas ganti dengan Dalmas dalam menanggulangi huru-hara.

Kapuslat Korps Brimob Polri Kombes Pol, Drs. Unggung Cahyono menuturkan, latihan terpadu lima kemampuan Brimob dilaksanakan di Cikeas tersebut merupakan ide atau gagasan dari Brimob Polri, agar latihan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2007 dibagi 4 triwulan untuk dipadukan secara spektakuler dengan jumlah personel dan peralatan yang banyak. Latihan tersebut juga untuk melihat prasarana dan peralatan yang dimiliki oleh Brimob saat ini, guna melihat apakah sudah cukup atau masih ada kekurangan dan hasilnya pada saat digunakan latihan masih ada kekurangan seperti kendaraan APC dan AWC. Menurut Kapuslat pengendalian unjuk rasa itu ditangani oleh Dalmas, dimana dalam

penanganannya ada Dalmas awal dan lanjutan, akan tetapi kalau sudah berkaitan dengan kerusuhan massa maka yang dilibatkan adalah Detasemen PHH Brimob. Pada saat latihan dimana massa sudah anarkis ditangani oleh Detasemen Berat Brimob.

Kapuslat Korps Brimob menyampaikan paparan diruang transit Cikeas kepada Wakapolri dan Pejabat Utama Mabes Polri serta seluruh Kasat Brimob Daerah tentang scenario latihan dan menyampaikan konsep Detasemen Berat PHH, sesuai dengan tema latihan yaitu "**Membangun SDM Brimob Polri melalui latihan terpadu lima kemampuan Brimob Polri guna menghadapi situasi kontijensi**".

Pada saat latihan Rantis yang digunakan Denber PHH dari Korps Brimob, Sat Brimob Metro dan Sat Brimob Jabar. Sementara untuk kendaraan pendukung seperti mobil pemadam kebakaran dari Kodya Depok, Sesuai dengan tema latihan, situasi kontijensi perlu diantisipasi untuk diprediksi apabila sudah terjadi memerlukan penanganan khusus memerlukan tenaga dan biaya yang besar.

Kontijensi ada beberapa jenis; kontijensi keamanan yaitu berupa kejahatan massal, teror dan sabotase. Kejahatan sosial yaitu unjuk rasa dan rusuh massa. Kontijensi yang berkaitan dengan bencana alam. Dengan melakukan latihan rutin sepanjang tahun dipadukan dalam latihan, juga uji coba Budomlak yang dibuat oleh Korps Brimob dan dibahas juga pada saat Rakernis Brimob Polri tahun 2007.

Kapuslat menilai bahwa hasil yang dicapai dalam latihan tersebut adalah sangat bagus meskipun dengan adanya beberapa kekurangan peralatan. Namun setidaknya dilapangan nanti anggota 90% sudah bisa menerapkan dengan baik. Disamping untuk menguji peralatan baru yang dimiliki oleh Polri seperti *alat suar, pepper boll* sekaligus uji penampilan anggota. Selesai latihan tersebut mengenalkan kepada Wakapolri alat-alat yang diciptakan oleh Brimob untuk mengantisipasi bila terjadi banjir, seperti rakit yang terbuat dari bambu dan jirigen, kemudian menciptakan alat pelampung yang terdiri dari botol-botol air mineral dan membuat perahu yang terbuat dari jirigen.

Pelatihan Modal Dasar Untuk Mencapai Sukses

Kompol Rahmat selaku instruktur dalam pelatihan lima kemampuan yang diadakan di Cikeas mengatakan bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang saat ini terjadi di Indonesia terkadang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena tidak jarang dalam implementasi dilapangan banyak



Bantuan personil melalui udara

sekali pelanggaran-pelanggaran yang harus disikapi dengan bijaksana oleh anggota Korps Brimob. Satuan Brimob sebagai pamungkas Polri dalam pelaksana penindakan huru-hara tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan, namun harus mengambil tindakan tegas dan memperhatikan aturan-aturan hukum serta ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).

Program latihan rutin yang telah dilaksanakan oleh Brimob seharusnya mampu menjawab setiap tantangan dalam menghadapi tugas kedepan, tentunya latihan harus dilaksanakan dengan terencana, benar dan dilandasi dengan tekad serta semangat yang bulat untuk mewujudkan Satuan Brimob yang handal dan profesionalisme sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang berubah setiap waktu menuntut kesiapan dan kesiagaan personil Korps Brimob, dimana akan mempengaruhi pola-pola latihan yang akan dilaksanakan. Apabila situasi mengarah kepada hal-hal yang bersifat rusuh massa, maka Satuan Brimob akan banyak berlatih bagaimana cara-cara penanganan terhadap kerusuhan massa dengan selalu mempertimbangkan dan memperhatikan aturan-aturan hukum dan ketentuan yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Apabila diprediksi bahwa akan banyak terjadi bencana alam maka latihan-latihan bagi personil Brimob banyak diarahkan kepada latihan penanganan dan pertolongan korban bencana alam. Dilematis akan terjadi apabila kita selaku Satuan Brimob yang selalu siap dan siaga dalam menghadapi situasi kontijensi tidak mempersiapkan pola-pola latihan dengan baik dan banyak melaksanakan latihan dengan tidak terarah dan bertujuan dengan baik menuju suatu arah perubahan atau peningkatan serta latihan-latihan yang monoton dan tidak mengikuti situasi dan kondisi bangsa pada saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya kejadian-

kejadian diatas dapat ditangani dengan baik dengan turunnya langsung Satuan Brimob dimedan tugas seperti kejadian Tsunami di Aceh dan kerusuhan massa.

Brimob Polri Siap Digerakkan Kemanapun Dan Dimanapun

Kapolri dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakapolri Komjen Pol, Drs. Makbul Padmanegara usai menyaksikan latihan, bahwa institusi Polri didalam hubungan tata kenegaraan mempunyai posisi langsung dibawah Presiden yang keberadaannya dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dimana pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas Polri adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik organisasi Polri dibangun dalam tingkatan satuan yang levelnya berjenjang mulai dari tingkat Mabes sampai tingkat Polsek dan Pos Pol dan satuan fungsional dimana salah satunya adalah Brimob Polri. Korps Brimob Polri adalah sebagai bagian integral dari organisasi Polri yang menjalankan fungsi teknis kepolisian, bantuan taktis operasional, back up Satuan Kewilayahan merupakan kekuatan andalan Polri yang selalu siap digerakkan kapanpun dan dimanapun.

Tugas Pokok Korps Brimob Polri melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata, bom, bahan kimia, biologi. Selain itu bersama unsur kepolisian lainnya mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia terutama didaerah-daerah konflik, seperti Poso, Ambon, Aceh serta tugas-tugas lain yang dibebankan kepada anggota Brimob.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana telah diperagakan anggota Korps Brimob Polri, yang memiliki lima kemampuan yaitu Reserse Mobil, Penanggulangan Huru-hara, Search dan Rescue, Penjinakan Bom, Wanteror. Sedangkan strata kemampuan dari Brimob itu sendiri adalah Brimob Dasar, Pelopor, Gegana dan instruktur. Sejalan dengan adanya pembenahan ditubuh Polri melalui perubahan tiga aspek penting yaitu struktural, kultural dan instrumental Brimob Polri terus menindak lanjuti perubahan tersebut secara baik. Hal itu sangat membanggakan bagi Polri perubahan yang tentunya terjadi pada Brimob adalah perubahan kultur ditubuh Brimob dari yang sebelumnya bergaya militeris, arogan dan cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah telah berubah.

Brimob Polri menjadi Polisi yang patuh hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal itu bisa dibuktikan oleh anggota Brimob Polri, misalnya pada waktu terjadi musibah di Papua, pada waktu penanganan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut telah jatuh korban, dimana telah gugur anggota Polri, namun anggota Brimob menyelesaikannya bukan dengan balas dendam tapi menyelesaikannya dengan hukum. Hal tersebut merupakan kebanggaan, memang sebagai anggota Polri tentunya merasa bersedih dan ikut berduka cita, karena ada rekan sesama anggota Polri yang gugur, tetapi sebagai anggota Brimob tentunya juga bangga karena bisa mengendalikan diri melawan kekerasan, melawan anarkis tidak dengan cara balas dendam tetapi dengan cara hukum. Setelah menyaksikan peragaan latihan lima kemampuan yang dimiliki oleh Brimob Polri, Wakapolri merasa bangga dengan semua peragaan yang diperagakan oleh anggota Brimob.*** (sumber : Teratai Edisi 52/2007)



Evakuasi para tersangka teroris

SOEHARTO

DARI RAKYAT MENJADI PEMIMPIN

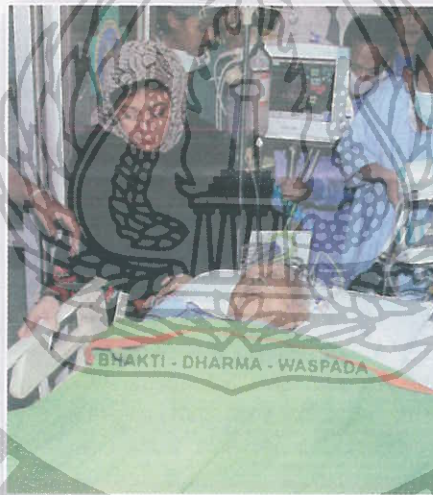


Mantan Presiden Soeharto

Mantan Presiden Soeharto sampai pada kesempurnaannya menjalani kehidupan, Pak Harto wafat dalam usia 87 tahun. Minggu, 27 Januari 2008, pukul 13.10 WIB, di RSPJ Jakarta, Pak Harto wafat karena gagal multiorgan setelah dirawat selama 24 hari. Sedih bergelora pilu tentu menggenapi seluruh Bangsa Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke, para tetua dan pemuda tentu merasa kehilangan. Dengan kepergian sang fenomenal tentu penyikapannya juga fenomenal, kepergian seorang Jenderal besar, yang oleh MPR dianugrahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional tentu merupakan peristiwa bersejarah yang berkesan bagi Bangsa dan dunia.

Pak Harto lahir di Kemusuk Argamulya Yogyakarta 8 Juni 1921, adalah putra Kartosudiro dan Sukirah, anak petani dan berkarier sebagai tentara, terpilih menjadi siswa teladan di sekolah Bintara Gombang Jawa Tengah tahun 1941, kemudian bergabung dengan KNIL. Duapuluh enam tahun kemudian Pak Harto menjadi Presiden RI tahun 1968 sebagai presiden RI kedua. Dari seorang rakyat Pak Harto sampai hari terakhir hayatnya tidak pernah berhenti memimpin rakyat, peristiwa tutup usianya sendiri memberikan kepemimpinan kepada rakyat untuk berada dalam ketenangan dan keihlasan tatkala menghadapi sebuah persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pak Harto adalah orang yang tumbuh seperti kebanyakan yang dialami oleh sebagian besar anak Indonesia, lingkungan pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang berkepanjangan, kesulitan mendapatkan pendidikan yang memadai dan ketiadaan harapan akan sebuah masa depan yang lebih baik, situasi dan kondisi jaman atau dinamika sejarah yang menggiring Soeharto akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin, Begitu pula yang menentukan nasib kepemimpinannya, lebih ditentukan dari sejarah, dimana bukan orang perorang yang mengarahkannya, melainkan oleh sebuah dinamika kehidupan



Mantan Presiden Soeharto dalam perawatan

yang mewarnai situasi dan kondisi jaman. Bagaimanapun 32 tahun bukanlah periode yang pendek dalam masa kepemimpinan Pak Harto, ada ikatan emosional yang dalam atas kepergian mantan penguasa Orde Baru, hal ini sangat beralasan sebagai penguasa selama 32 tahun banyak telah diperbuat Soeharto untuk mewujudkan negeri ini, mesti ada banyak kesalahan yang dilakukan termasuk KKN, namun sebagian orang bisa memaklumi atas jasa-jasanya yang banyak untuk masyarakat.

Pak Harto memang kontroversial, diantara sekian banyak catatan yang membuat geram aktivis, khususnya dari generasi muda, Pak Harto tetap merupakan sosok yang paling bertanggung jawab dalam menyelamatkan

Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemampuan diplomatik Soeharto yang patut diacungi jempol dengan kesuksesannya mengakhiri konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Dibidang perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat Pak Harto menjadi pejabat Presiden pada tanggal 12 Maret 1967, dilantik MPRS sebagai Presiden pada tanggal 17 Maret 1968, krisis ekonomi sedang berlangsung, Indonesia nyaris kolaps, inflasi mencapai ratusan persen, sektor riil merangak teramat perlahan dan laju pertumbuhan penduduk membuat situasi membuat semakin runyam.

Pak Harto menempuh langkah pragmatis, dengan merekrut sejumlah akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pilihan tersebut terbilang tepat hanya dalam empat tahun inflasi bergeser dibawah sepuluh persen, ini menjadi langkah pertama untuk menggapai angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Salah satu hal yang dapat dikatakan prestasi adalah kemampuan Pak Harto mengurangi kemiskinan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata kemiskinan dapat ditekan walaupun belum mampu dihilangkan, kemajuan Negara Indonesia dalam bidang pertanian dan perikanan sehingga Indonesia menjadi Negara agraris dan berhasil menjadi penghasil beras di Asia Tenggara.

Stabilitas politik dalam kurun waktu 32 tahun terutama adalah perdagangan ekonomi subsidi Negara terhadap kebutuhan rakyat dari hasil pembangunan, dengan membuat pasar Inpres, membuat jalan, membuat gedung sekolah, membuat masjid, membuat irigasi bagi pertanian, penyediaan pupuk murah, membantu pemuda lewat KNPI dan organisasi mahasiswa, menciptakan kebijakan-kebijakan yang melahirkan swasembada pangan dan kebijaksanaan dibidang keuangan, Keluarga Berencana dan perbankan.

Pertumbuhan ekonomi dan subsidi begitu besar tersedia untuk rakyat, sumbernya berasal dari sumber daya alam terutama minyak bumi, pendapatan Negara sangat besar dari minyak dan gas, bukan dari hasil industri dan jasa



Warga Jakarta antusias memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Pak Harto

masyarakat melalui pajak, dipenghujung kekuasaannya, pendapatan dari minyak dan gas bagi ekonomi nasional semakin berkurang, sehingga mulai diusahakan dari sumber pajak dan investasi asing.

Ditingkat regional khususnya di Asia Tenggara Pak Harto lebih fokus menggalang kerjasama perekonomian daripada membangun politik mercusuar, perkembangan politik luar negeri Indonesia selama Pak Harto adalah pembentukan organisasi kerjasama lima Negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Indonesia yang disebut ASEAN, peristiwa internasional dimana Indonesia berperan sebagai tuan rumah seperti KTT Non Blok, pertemuan puncak APEC.

Setelah prosesi pelepasan jenazah Soeharto dari pihak keluarga kepada pihak Pemerintah, kemudian jenazah Presiden RI diberangkatkan ke Halim Perdanakusumah Jakarta melalui Jl. Teuku Umar, Taman Suropati, Jl. Diponegoro, Jl. Rasunasaid Kuningan, Jl. Gatot Subroto dan Jl. MT. Haryono lewat Cawang hingga Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, ribuan warga ibukota turun kejalan-jalan sambil melambaikan tangan saat iring-iringan mobil pengantar jenazah mantan Presiden Soeharto melintas Senin (28/1) mulai bergerak sekitar 07.30 WIB diawali motor dari Polisi Militer, Mobil Jenazah Soeharto yang

didepannya terpampang foto mantan Presiden Soeharto beserta karangan bunga, urutan selanjutnya adalah bus yang ditumpangi pihak keluarga dan tamu-tamu lainnya sebanyak tiga buah bis dan sebagai penutup dari iring-iringan tersebut adalah mobil pengawalan dari Polisi. Jenazah mantan Presiden Soeharto diterbangkan dari Bandara Udara Halim Perdanakusuma pada pukul 08.30 WIB, Senin (28/1) dengan menggunakan pesawat Hercules VIP A 1341 dari Squadron 17 Halim Perdanakusuma, pesawat berangkat menuju Bandara Adi Sumarno Solo. Ribuan masyarakat kota Solo dan Kabupaten Karanganyar Senin (28/1) pagi berjubel memadati jalan yang dilewati iring-iringan jenazah mantan Presiden Soeharto menuju tempat peristirahatan terakhir di Astana Giribangun Kabupaten Karanganyar, di Astana Giribangun ribuan pelayat sudah berdatangan, warga dari berbagai kota sudah berada disekitar kompleks pemakaman namun

tidak diperkenankan memasuki kawasan Astana Giribangun.

Upacara kemiliteran pemakaman Presiden Soeharto yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga dihadiri Wapres Yusuf Kalla, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan mantan menteri semasa Soeharto menjadi Presiden, selain itu hadir sejumlah pemimpin pemerintahan Negara tetangga yang menjadi kolega dekat Presiden Soeharto diantaranya mantan PM. Malaysia Mahatir Mohamad, mantan PM Singapura Lee Kwan Yew, mantan PM Australia Paul Keating dan Mentu Thailand Nitya Pilbusonggram, para pemimpin lembaga tinggi Negara dan Lembaga Negara juga hadir, diantaranya Wakil Ketua MPR AM. Fatwa dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Diluar pro dan kontra mengenai Pak Harto, kita melihat bagaimana isak tangis dan kesetiaan sebagian anggota masyarakat yang ditunjukkan dengan berbondong-bondong ikut mengantarkan jasadnya ketempat peristirahatan terakhir, mari kita panjatkan doa semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya.

*Selamat jalan Pak Harto, semoga berada dengan tenang disisi Allah SWT. ****



Peti jenazah diberangkatkan dari rumah kediaman